

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan



tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset**

### **Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah



melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Kota Bandung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan lingkup keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Wali Kota Bandung No. 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Program, Data dan Informasi
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
  1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Analisa Kebutuhan;
  2. Sub Bidang Anggaran Belanja
  3. Sub Bidang Anggaran belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pendapatan, Transfer dan Pengelolaan Kas Umum Daerah;
  2. Sub Bidang Belanja Langsung;
  3. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- e. Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset membawahkan :
  1. Sub Bidang Inventarisasi Aset;

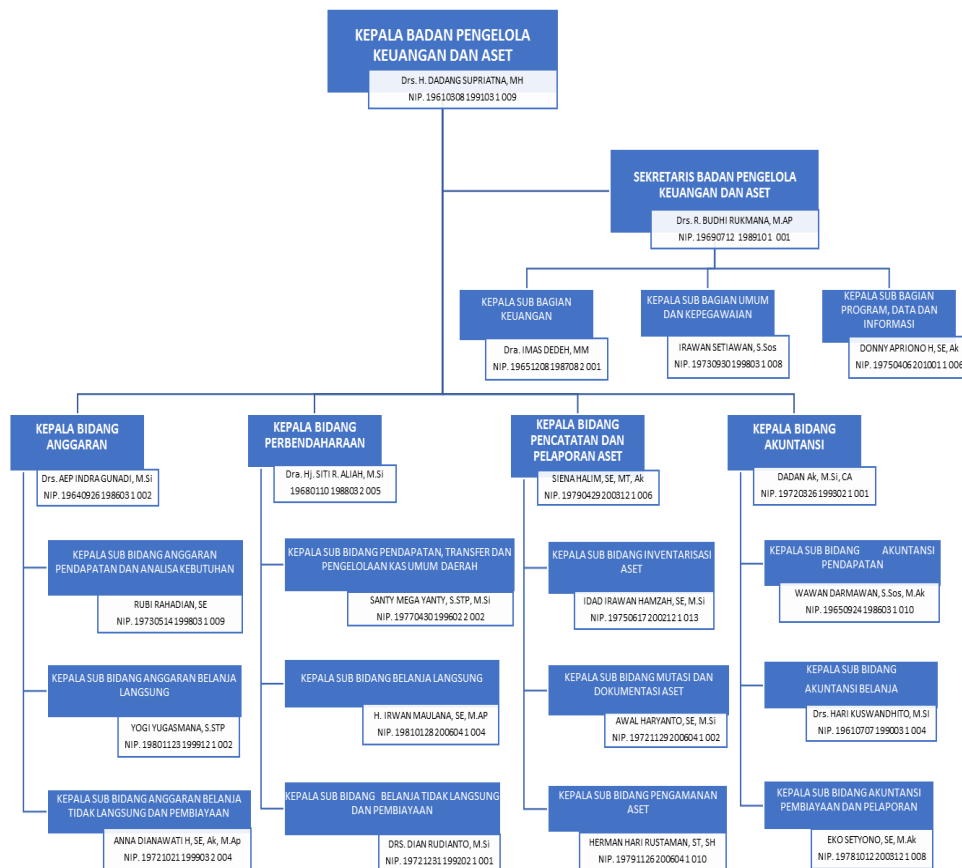


2. Sub Bidang Mutasi dan Dokumentasi Aset;
  3. Sub Bidang Pengamanan Aset;
- f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
  2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
  3. Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban BPKA dipimpin oleh Drs. DADANG SUPRIATNA, MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG





### C. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi perangkat daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan perangkat daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Perubahan lingkungan Strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Adapun isu Strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selama ini antara lain : Target Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saat ini belum tercapai. Berdasarkan LHP BPK RI Nomor 39A/LHP/XVIII.BDG/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung TA.2017 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu masalah legalitas kepemilikan lahan tanah milik Pemerintah Kota Bandung, yaitu masih banyaknya lahan tanah milik Pemerintah Kota Bandung masih belum tersertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional.

#### **D. Landasan Hukum**

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.



## E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

### BAB IV PENUTUP









Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sehingga Renstra DPKAD 2014-2018 telah melalui reviu dan Revisi Renstra tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.



## Visi



Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota

Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2013-2018 mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa visi Perangkat Daerah mengacu pada visi Kota Bandung sesuai pasal 269 adalah sebagai berikut :

- **Visi Kota Bandung : “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

## Misi



Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset mengikuti Misi ke 2 Kota Bandung sebagai berikut :

- **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani”.**

### ***Tujuan dan Sasaran***

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset untuk Tahun 2018 sebanyak 2 (Dua) sasaran strategis.

Revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
			RAPBD tepat waktu	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja
			RAPBD - P tepat Waktu	-	-	-	30 Hari Kerja	30 Hari Kerja
			Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	75%	80%	85%	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
		Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat/di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi	12,75%	14%	15%	16%	17%

### Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 625 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	Opini BPK RI		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah kota Bandung Menjadi Kategori Nilai yang diperoleh	Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya
		RAPBD tepat waktu	hari kerja	-	Dari ditandatanganinya KUA /PPAS sampai RAPBD	-
		RAPBD - P tepat Waktu	hari kerja	-	Dari ditandatanganinya KUA /PPAS sampai RAPBD-P	-
		Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	-	Waktu penyelesaian SP2D dimulai setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan, lama waktu penyelesaian adalah 2 (dua) hari untuk periode Januari – November dan	Berdasarkan tanggal masuk penerimaan SPM yang lengkap dan sah serta tanggal terbitnya SP2D

					7 (tujuh) hari untuk bulan Desember.	
2	Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase luas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat / di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi	%		Tanah Milik Pemerintah kota Bandung bersertifikat/ yang di Daftarkan ke BPN untuk disertifikasi	DatabaseTanah Milik Pemerintah kota Bandung bersertifikasi/ yang di Daftarkan ke BPN untuk disertifikasi



### Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2014-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Badan



Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	WTP
		Penyusunan RAPBD	60 hari Kerja
		RAPBD - P tepat Waktu	30 Hari Kerja
		Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	2 hari kerja
2	Meningkatnya Penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi	600 Bidang

#### Perencanaan Anggaran Tahun 2018

Dari sebanyak 2 (dua) Sasaran dengan indikator yang ditetapkan didukung oleh jumlah Program sebanyak 3 (tiga) Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.612.690.892,00.

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Tahun 2018**

No	Sasaran	Jumlah Program/Kegiatan yang Terkait Langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2018
1	Sasaran 1	2 Program / 22 Kegiatan	5.116.430.369
2	Sasaran 2	2 Program / 6 Kegiatan	7.496.260.523
	Jumlah	3 Program 28 / 28 Kegiatan	12.612.690.892





## 1.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2018, sebagai berikut :

### E. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu  
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	opini BPK RI	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
			RAPBD tepat waktu	hari kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja	60 Hari Kerja
			RAPBD - P tepat Waktu	hari kerja	-	-	-	30 Hari Kerja	30 Hari Kerja
			Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	75%	80%	85%	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja
		Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat/di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi	%	12%	13%	15%	16%	17%

*Perjanjian Kinerja Hasil Reviu*



*Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Ba dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :*

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	opini BPK RI	WTP
		RAPBD tepat waktu	hari kerja	60
		RAPBD - P tepat Waktu	hari kerja	30
		Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	2
2	Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Jumlah bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang di daftarkan ke BPN untuk desertifikasi	Bidang	600

**PERJANJIAN  
KINERJA**



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset.





## Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

### Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Yellow
4	Kurang	50.00 – 64.99	Red
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Tanggal 07 Februari 2018, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator





## Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 060/166- BPKA tanggal 08 Februari 2018 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Tanggal 07 Februari 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung**  
**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	opini BPK RI	WTP	WDP	75.00
2	RAPBD tepat waktu	hari kerja	60	8	187.00
3	RAPBD - P tepat Waktu	hari kerja	30	15	173.00
4	Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	2	2	100.00
5	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat/ di daftarkan ke BPN untuk desertifikasi	%	17%	29.31%	172.41



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Penyusunan RAPBD, dengan capaian kinerja 187 %, pada indikator RAPBD - P tepat Waktu, dengan capaian kinerja 173 %. Begitu pula Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat/ di daftarkan ke BPN untuk desertifikasi telah terealisasi sebesar 29,31%. Prosentase tersebut didapat dari jumlah luas lahan tanah yang bersertifikat sampai dengan tahun 2018 yaitu 3.265.963m<sup>2</sup> dibandingkan dengan luas lahan Kota Bandung pada awal periode Renstra 2013-2018 seluas 11.144.426m<sup>2</sup>, sehingga capaiannya yaitu 172,41%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja 75 %.

### **Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**



Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**

**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	opini BPK RI	WTP	WDP	75.00
2	RAPBD tepat waktu	hari kerja	60	8	187.00
3	RAPBD - P tepat waktu	hari kerja	30	15	173.00
4	Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	2	2	100.00
5	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat/di daftarkan ke BPN untuk desertifikasi	%	17%	29,31%	172.41

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	60.00 %
2	Sesuai Target	20.00 %
3	Tidak Mencapai Target	20.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60.00</b>	<b>1</b>	<b>20.00</b>	<b>1</b>	<b>20.00</b>

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>5</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	60.00 %
2	Sesuai Target	1	20.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	20.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :



- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	opini BPK RI	WDP	WDP	100	WDP	WDP	100	WTP	WDP	75	WTP	WDP	75	WTP	WDP	75
2	RAPBD Tepat Waktu	hari kerja	60 Hari Kerja	95 Hari Kerja	63.16	60 Hari Kerja	11 Hari Kerja	181.66	60 Hari Kerja	6 Hari Kerja	190	60 Hari Kerja	42 Hari Kerja	130	60 Hari Kerja	8 Hari Kerja	187
3	RAPBD - P tepat Waktu	hari kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Hari Kerja	15 Hari Kerja	150	30 Hari Kerja	15 Hari Kerja	173
4	Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu	hari kerja	75%	79,38 %	105.84	80%	99.99 %	124.98	85%	100%	117.65	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	100	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	100



Sasaran Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah" adalah sebesar WDP dari target sebesar WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah" tahun ini adalah sebesar 75.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 75.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Penyusunan RAPBD " adalah sebesar 8 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 187.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Penyusunan RAPBD " tahun ini meningkat 57.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 130.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Penyusunan RAPBD " tahun ini adalah sebesar 187.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 13.33 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "RAPBD - P tepat Waktu" adalah sebesar 15 dari target sebesar 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 173.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "RAPBD - P tepat Waktu" tahun ini meningkat 23.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 150.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "RAPBD - P tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 173.00 %, bila dibandingkan dengan target



akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kerjanya mencapai 50.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu" adalah sebesar 2 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata rata penyelesaian SP2D tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

**Sasaran 2**  
Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014		%	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat/di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi	%	12.75	12.78	100.23	14	15.45	100.24	15	10.82	72.06	16	25.10	156.87	17	29.31	172.41



Sasaran Meningkatnya Panatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi " adalah sebesar 29.31 % dari target sebesar 17% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 172.41%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi " tahun ini meningkat 14.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang di daftarkan ke BPN untuk disertifikasi " tahun ini adalah sebesar 29.31%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset maka capaian kinerjanya mencapai 172.41%.

**Tabel 3.8**  
**Analisis Efisiensi**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung**

No	SASARAN	% Rata rata Kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	SASARAN 1	133%	76%	56%
2	SASARAN 2	172.41%	78%	94%
		152.70%	77%	75%



## BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 133 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 172.41 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.612.690.892,00 dari total Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 20.163.066.143,00 sedangkan Realisasi Anggaran Program Utama mencapai Rp. 10.175.039.836,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.437.651.056,00.

Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung 2013-2018 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 133 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 172.41 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran Program Utama BPKA telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.612.690.892,00 (Dua belas milyar enam ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung adalah 81 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.





Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

**Bandung,**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET KOTA BANDUNG**

**Drs. DADANG SUPRIATNA, MH**  
**NIP.196103081991031009**